



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu di bidang pelayanan kesehatan membutuhkan peran serta masyarakat, sehingga merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tarif pelayanan kesehatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 serta pelayanan kesehatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364 Tahun 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Jasa Umum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 tahun 2001 tentang Pengawasan dan Persyaratan Sanitasi Retribusi Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Perijinan di Bidang Kesehatan(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 tahun 2007 tentang Kejadian Luar Biasa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 22);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
5. Puskesmas adalah perangkat pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
6. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah perangkat pembantu pelaksana teknis Puskesmas Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
7. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah sarana pelayanan kesehatan ditingkat kelurahan yang merupakan wujud Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat wilayah setempat atas dasar musyawarah;
8. Tindakan adalah suatu kegiatan yang dialami penderita, mengandung resiko, selain mendapatkan obat yang memerlukan keterampilan khusus untuk pelaksanaannya. Kegiatan ini diperlukan sebagai bagian yang menunjang proses pengobatan dan penyembuhan;
9. Tindakan medis adalah tindakan yang menyangkut kegiatan pengobatan tanpa alat bantu pisau bedah termasuk pelayanan gigi;
10. Tindakan bedah adalah tindakan yang menyangkut kegiatan pengobatan dengan alat bantu pisau bedah;

11. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang yang datang ke Puskesmas dan jejaringannya untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap puskesmas dan jejaringannya;
12. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang yang datang ke Puskesmas dan jejaringannya untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap puskesmas dan jejaringannya;
13. Tindakan fisioterapi adalah tindakan pelayanan rehabilitasi medik (melalui latihan-latihan fisik dan penyinaran) dalam menunjang penyembuhan;
14. Penunjang diagnostik adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk menegakkan diagnosa penyakit;
15. Radiologi adalah alat penunjang diagnostik yang menggunakan sinar – X;
16. Laboratorium Puskesmas adalah alat penunjang diagnostik yang menggunakan bahan kimia (reagensia);
17. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah pelayanan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
18. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi, imunologi, patologi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan [enyakit dan pemulihan kesehatan];
19. Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama menunjang pencegahan upaya penyakit dan peningkatan kesehatan;
20. Konsultasi kesehatan adalah pelayanan konseling berkaitan dengan masalah kesehatan secara individu;
21. Surat Keterangan Kesehatan adalah surat keterangan yang menunjukkan status kesehatan seseorang berupa surat keterangan sehat, sakit, calon pengantin, kehamilan/melahirkan, kematian dan surat keterangan kesehatan lainnya;
22. Mobil Ambulan adalah kendaraan yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk digunakan melayani/membawa/mengirim pasien;
23. Mobil Pusling adalah kendaraan Puskesmas Keliling yang dilengkapi dengan alat kesehatan dan digunakan untuk pelayanan kesehatan keliling;
24. Perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang / badan yang menyediakan atau mendirikan jasa pelayanan kesehatan yang wajib mendapatkan izin Walikota;
25. Rekomendasi adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk melengkapi proses perizinan yang berkaitan dengan Profesi, Institusi, Tempat – Tempat Umum, Keamanan Farmasi dan Pangan, Tempat Pengolahan Makanan, Pemberantasan Hama;
26. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
27. Wajib retribusi adalah orang pribadi / badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan dan perizinan bidang kesehatan;
28. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRTD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mengisi data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

BAB II
JENIS/GOLONGAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB III
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya.
- (3) Subjek Retribusi adalah Orang/badan yang mendapat dan atau memerlukan pelayanan kesehatan.

BAB IV
CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Pelayanan kesehatan terdiri dari :

- a. Rawat jalan;
- b. Rawat inap;
- c. Tindakan gigi;
- d. Tindakan medik;
- e. Tindakan fisioterapi;
- f. Penunjang diagnostik;
- g. Konsultasi kesehatan;
- h. Pelayanan laboratorium;
- i. Pelayanan psikologi;
- j. Pelayanan surat keterangan kesehatan;
- k. Pemakaian mobil ambulance / Pusling.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana Pasal 5 huruf a dijamin oleh pemerintah Kota Banjarmasin kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Penduduk Kota Banjarmasin yang tidak memiliki jaminan kesehatan seperti Askes PNS, Askes Sosial, Askes Komersial, Asabri, Jamsostek, Jamkesmas, Jamkesda, dan jaminan kesehatan lainnya;

- 1
- b. syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang berusia di atas 17 tahun dan Kartu Keluarga bagi yang berusia di bawah 17 tahun;
 - c. bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana huruf a diwajibkan menunjukkan kartu kepesertaannya.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana Pasal 5 huruf b sampai k dikenakan retribusi sesuai tarif yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.
Pelayanan Kesehatan yang dikenakan retribusi adalah :
- a. Tindakan gigi;
 - b. Tindakan medik;
 - c. Tindakan fisioterapi;
 - d. Penunjang diagnostik;
 - e. Konsultasi kesehatan;
 - f. Pelayanan laboratorium;
 - g. Pelayanan psikologi;
 - h. Rawat inap;
 - i. Surat Keterangan Kesehatan kecuali surat keterangan kesehatan untuk pelajar;
 - j. Pemakaian Mobil Ambulance/Pusling;
 - k. Surat Keterangan Membawa Jenazah Keluar Daerah.
- (3) Bagi penduduk luar kota Banjarmasin yang berobat di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu /Puskesmas Keliling/ Poskesdes dikenakan retribusi.
- (4) Komponen tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
- a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana.

BAB VI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Perizinan bidang kesehatan terdiri dari :
- a. Izin operasional;
 - b. Izin praktek;
 - c. Izin kerja;
 - d. Rekomendasi.
- (2) Komponen tarif retribusi untuk setiap jenis perizinan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) terdiri atas :
- a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, sarana yang digunakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Besarnya retribusi yang dikenakan kepada Subjek Retribusi adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 11

Pemungutan retribusi adalah wilayah Kota Banjarmasin.

BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan dilaksanakan oleh petugas Dinas Kesehatan atau instansi Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan diterima oleh Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima di Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Kesehatan atau Bendaharawan Khusus Penerima di Dinas Kesehatan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi Perizinan diterima oleh Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima di Dinas Kesehatan.
- (4) Hasil pungutan retribusi yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, semuanya disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pelunasan pembayaran pungutan menurut Peraturan Daerah ini, diberikan bukti pembayaran kepada yang bersangkutan.

- (4) Bukti penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3), dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD, dan Surat Keputusan keberatan yang mewajibkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Direktorat Jenderal kekayaan negara (DKJN).
- (2) Penagihan retribusi melalui DKJN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan penyidikan disertai surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang dan memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan menyampaikan hasil penyidikan, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan masih dapat dipungut sampai dengan 31 Desember 2011.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Persyaratan Sanitasi Retribusi Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Perijinan di Bidang Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 01 Agustus 2011

WALIKOTA BANJARMASIN, Z



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 04 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
	I Rawat jalan di Puskesmas dan Pustu				
1	Rawat jalan dokter umum	5,000	3,000	2,000	
2	Rawat jalan dokter gigi/intra oral camera	5,000	2,200	2,800	
3	Rawat jalan pelayanan dokter spesialis.	15,000	9,000	6,000	
4	Rawat jalan pelayanan dokter spesialis luar.	20,000	16,000	4,000	
	II Perawatan gigi				
1	Cabut gigi susu	6,000	3,600	2,400	
2	Cabut gigi tetap seri, taring, premolar 1&2	7,500	4,500	3,000	
3	Cabut gigi tetap dengan penyulit	9,500	5,700	3,800	
4	Cabut gigi tetap dengan cito jet	30,000	13,200	16,800	
5	Perawatan pulp capping dan Trepanasi	6,000	2,640	3,360	
6	Tumpatan sementara	6,000	2,640	3,360	
7	Tumpatan Amalgam	7,500	3,300	4,200	
8	Tumpatan glass ionomer	9,000	3,960	5,040	
9	Tumpatan Light cure	40,000	17,600	22,400	
10	Buang karang gigi manual	15,000	9,000	6,000	
11	Buang karang gigi ultrasonik	20,000	8,800	11,200	
12	Incisi abscess	9,000	3,960	5,040	
13	Operculectomy	12,000	5,280	6,720	
14	Koreksi oklusi	7,500	3,300	4,200	
15	Perawatan saluran akar	8,000	3,520	4,480	
	III Tindakan Medik				
1	Debridement	10,000	4,400	5,600	
2	Jahit luka luar				
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	10,000	6,000	4,000	
	b. Jahit luka 6-10 jahitan	15,000	9,000	6,000	
	c. Jahit luka > 10 jahitan	20,000	12,000	8,000	
3	Jahit luka dalam				
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	25,000	15,000	10,000	
	b. Jahit luka 6-10 jahitan	45,000	27,000	18,000	
	c. Jahit luka > 10 jahitan	60,000	36,000	24,000	
4	Lepas jahitan				
	a. Lepas jahitan 1-5 jahitan	5,000	3,000	2,000	
	b. Lepas jahitan 6-10 jahitan	10,000	6,000	4,000	
5	Bedah Minor				
	a. Atheroma	20,000	12,000	8,000	
	b. Lipoma	20,000	12,000	8,000	
	c. Clavus/Callus	20,000	12,000	8,000	
	d. Telinga Dawir	15,000	9,000	6,000	
	e. Circumsisi	50,000	30,000	20,000	
6	a. Perawatan luka bakar < 10%	20,000	8,800	11,200	
	b. Perawatan luka bakar > 10% Tidak kompleks	30,000	13,200	16,800	
7	Mengobati Luka Excoriasi/lecet	7,000	4,200	2,800	
8	Ganti perban	5,000	3,000	2,000	
9	Tindik daun telinga	7,000	4,200	2,800	
11	Incisi	15,000	9,000	6,000	
12	Eksisi	25,000	15,000	10,000	
13	Ekstraksi Kuku	20,000	12,000	8,000	
14	Ekstrasi corpus alineum				
	a. Telinga	10,000	6,000	4,000	
	b. Hidung	10,000	6,000	4,000	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
15	Suntikan ATS/SABU (tidak termasuk Vaksin)	20,000	12,000	8,000	
16	Pemeriksaan Tonometer	7,500	4,500	3,000	
17	Pasang kateter	25,000	15,000	10,000	
18	lepas kateter	10,000	6,000	4,000	
19	Pasang infuse	15,000	9,000	6,000	
20	Pemberian oksigen / Liter / jam	10,000	6,000	4,000	
22	Pemasangan spalk	25,000	15,000	10,000	
23	Pemakaian Nebulizer	35,000	21,000	14,000	
IV. Tindakan Obstetri dan Ginekologi					
1	Pemasangan IUD	15,000	9,000	6,000	
2	Pelepasan IUD	10,000	6,000	4,000	
3	Pemasangan implant	25,000	15,000	10,000	
4	Pelepasan implant	30,000	18,000	12,000	
5	Persalinan normal di Puskesmas dan Jaringan	500,000	300,000	200,000	
6	Biaya pengambilan pap smear / IVA	10,000	4,400	5,600	
7	Senam Hamil	10,000	6,000	4,000	
V Tindakan Fisioterapi					
1	Tindakan I (1 areal yang diterapi)	7,500	3,300	4,200	
2	Tindakan II (2 areal yang diterapi)	21,000	9,240	11,760	
3	Tindakan III (2 areal plus manual terapi)	27,000	11,880	15,120	
4	Tindakan IV (>3 areal plus manual terapi)	35,000	15,400	19,600	
5	ASKES (1 paket)	50,000	22,000	28,000	
VI Surat Keterangan Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan					
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum	5,000	3,000	2,000	
2	Calon Pengantin	10,000	4,400	5,600	
3	Pendidikan/Penataran bagi PNS	10,000	6,000	4,000	
4	Surat keterangan sakit	5,000	3,000	2,000	
5	Surat Ijin Pengambilan data penelitian	5,000	3,000	2,000	
6	Keterangan kehamilan/persalinan	10,000	6,000	4,000	
7	Surat keterangan tidak buta warna	10,000	6,000	4,000	
8	Surat keterangan tidak bertato	10,000	6,000	4,000	
9	Surat keterangan tidak bertindik	10,000	6,000	4,000	
10	Surat keterangan bebas narkoba	40,000	17,600	22,400	
11	Surat Keterangan Lansia	5,000	3,000	2,000	
VII Pemeriksaan Penunjang Diagnostik					
1	Radiologi				
a.	Film 35 x 35	30,000	13,200	16,800	
b.	Film 24 x 30	20,000	8,800	11,200	
c.	Jasa Baca Hasil	15,000	15,000	0	
2	Radiologi Gigi				
	Film	15,000	6,600	8,400	
3	Elektro Kardio Graf (EKG)				
a.	Pemeriksaan EKG	15,000	6,600	8,400	
b.	Jasa Baca Hasil	10,000	10,000	0	
4	Ultra Sono Graf (USG)				
	Pemeriksaan USG	75,000	33,000	42,000	
VIII Pelayanan Psikologi					
A Anak dan Remaja					
1	Tes kesiapan masuk TK/SD	25,000	11,000	14,000	
2	Tes kecerdasan TK 4 ½ - 5 ½ tahun	60,000	26,400	33,600	
3	Tes kecerdasan SD-SMP-SLTA	60,000	26,400	33,600	
4	Tes bakat	25,000	11,000	14,000	
5	Tes minat	25,000	11,000	14,000	
6	Pemilihan jurusan pendidikan	30,000	13,200	16,800	
7	Tes kepribadian	75,000	33,000	42,000	
8	Konsultasi masalah psikologi (1x pertemuan)	15,000	9,000	6,000	
9	Konseling /psikoterapi	40,000	24,000	16,000	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
B	Dewasa				
1	Tes kecerdasan	50,000	22,000	28,000	
2	Tes kepribadian	75,000	33,000	42,000	
3	Seleksi Promosi, mutasi karyawan biasa	60,000	26,400	33,600	
4	Seleksi promosi, mutasi Middle Management	80,000	35,200	44,800	
5	Seleksi promosi, mutasi Top Management	125,000	55,000	70,000	
6	Konsultasi masalah psikologi (1x pertemuan)	18,000	7,920	10,080	
7	Konseling /psikoterapi	40,000	24,000	16,000	
8	Pemeriksaan MMPI	85,000	34,000	51,000	
IX	Pemeriksaan Calon Jamaah Haji				
	Pemeriksaan Kesehatan CJH diluar penunjang	50,000	22,000	28,000	
X	Pelayanan lainnya				
1	Konsultasi Sanitasi, Gizi	5,000	3,000	2,000	
2	Test Kebugaran	10,000	4,400	5,600	
3	Pemakaian Mobil Pusling				
	- Pemakaian s/d 10 Km	35,000	21,000	14,000	
	- Pemakaian > 10 Km (dihitung	5,000	4,500	500	
4	Surat Keterangan Membawa Mayat Keluar Daerah	100,000	60,000	40,000	
XI	RAWAT INAP				
1	Visite dokter spesialis luar	60,000	48,000	12,000	
2	Konsul via telpon Dokter spesialis	20,000	18,000	2,000	
3	Visite dokter umum	5,000	3,000	2,000	
4	Jaga perawat / bidan	5,000	3,000	2,000	
5	Akomodasi / hari	35,000	21,000	14,000	
XII	UGD				
1	Pemeriksaan dokter jaga	15,000	9,000	6,000	
XIII	PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
A.	KIMIA LINGKUNGAN				
1.	Kimia dan Fisika Air				
1.	Bau	7,000	2,800	4,200	
2.	Rasa	7,000	2,800	4,200	
3.	Suhu	7,000	2,800	4,200	
4.	Warna	22,000	8,800	13,200	
5.	DHL/Daya Hantar Listrik	22,000	8,800	13,200	
6.	TSS/Zat tersuspensi	23,000	9,200	13,800	
7.	TDS/Zat Padat Terlarut	23,000	9,200	13,800	
8.	Kekeruhan	28,000	11,200	16,800	
9.	Besi terlarut (Fe)	35,000	14,000	21,000	
10.	Mangan	45,000	18,000	27,000	
11.	Seng	45,000	18,000	27,000	
12.	Timbal	45,000	18,000	27,000	
13.	Tembaga	45,000	18,000	27,000	
14.	Crom + 6	45,000	18,000	27,000	
15.	Arsen	75,000	30,000	45,000	
16.	Raksa	75,000	30,000	45,000	
17.	Selenium	75,000	30,000	45,000	
18.	Clorida	35,000	14,000	21,000	
19.	Magnesium	30,000	12,000	18,000	
20.	COD	56,000	22,400	33,600	
21.	BOD	37,000	14,800	22,200	
22.	Fenol	37,000	14,800	22,200	
23.	Sianida	27,000	10,800	16,200	
24.	Aluminium	30,000	12,000	18,000	
25.	Barium	56,000	22,400	33,600	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
	26. Flourida	35,000	14,000	21,000	
	27. Cadmium	35,000	14,000	21,000	
	28. Kepadatan CaCO3	20,000	8,000	12,000	
	29. Natrium	45,000	18,000	27,000	
	30. Nitrit	45,000	18,000	27,000	
	31. Nitrat	40,000	16,000	24,000	
	32. Perak	45,000	18,000	27,000	
	33. PH	15,000	6,000	9,000	
	34. Sulfat (SO4)	50,000	20,000	30,000	
	35. Sulfida (H2S)	36,000	14,400	21,600	
	36. DO/Oksigen terlarut	30,000	12,000	18,000	
	37. TOC	44,200	17,680	26,520	
	38. Minyak / Lemak	38,000	15,200	22,800	
	39. Boron	95,000	38,000	57,000	
	40. Nikel	70,000	28,000	42,000	
	41. Kobal	70,000	28,000	42,000	
	42. Sodium Absorbtion Ratio/SAR	25,000	10,000	15,000	
	43. Zat Organik	35,000	14,000	21,000	
	44. Amoniak	35,000	14,000	21,000	
	45. N-Total	44,000	17,600	26,400	
	46. Formalin	45,000	18,000	27,000	
	47. Sisa Chlor	10,000	4,000	6,000	
	48. Ozone	45,000	18,000	27,000	
2.	Biologi dan Bakteriologi Air				
	1. Bentos	60,000	24,000	36,000	
	2. Plankton	80,000	32,000	48,000	
	3. TPC	60,000	24,000	36,000	
	4. MPN Coliform	60,000	24,000	36,000	
	5. MPN Coli Tinja	60,000	24,000	36,000	
	6. E.Coli	60,000	24,000	36,000	
	7. Salmonella	60,000	24,000	36,000	
	8. Shigella	60,000	24,000	36,000	
	9. S.Aureus	60,000	24,000	36,000	
	10. Strep. Faecalis	60,000	24,000	36,000	
	11. V. Cholera	60,000	24,000	36,000	
3.	Pemeriksaan Fisika lainnya				
	1. Pencahayaan	10,000	4,000	6,000	
	2. kebisingan	45,000	18,000	27,000	
	3. Geteran	125,000	50,000	75,000	
4.	Makanan/Minuman				
	a. Bakteriologi				
	1. Stapylococcus	60,000	24,000	36,000	
	2. E. Coli	60,000	24,000	36,000	
	3. V. Cholera	60,000	24,000	36,000	
	4. Salmonella	60,000	24,000	36,000	
	5. MPN Coliform	60,000	24,000	36,000	
	6. MPN Colitinja	60,000	24,000	36,000	
	7. Angka Kuman	60,000	24,000	36,000	
	b. Kimiawi				
	1. Methyl Yellow	45,000	18,000	27,000	
	2. Borax	45,000	18,000	27,000	
	3. Rhodamin B.	45,000	18,000	27,000	
	4. Formalin	45,000	18,000	27,000	
	5. Siklamat	45,000	18,000	27,000	
	6. Sakarin	45,000	18,000	27,000	
	7. Arsenic	45,000	18,000	27,000	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
B	BIDANG HEMATOLOGI				
	1. Eosinofil, hitung jumlah	4,000	1,600	2,400	
	2. Limposit plasma biru, hitung jumlah	4,000	1,600	2,400	
	3. Morfologi sel	15,000	6,000	9,000	
	4. Retikulosit, hitung jumlah	4,500	1,800	2,700	
	5. Hematokrit, penetapan nilai	15,000	6,000	9,000	
	6. Hemoglobin eritrosit rata-rata/HER	5,000	2,000	3,000	
	7. Konsentrasi Hb eritrosit rata-rata/KHER	5,000	2,000	3,000	
	8. Volume eritrosit rata-rata/VER	5,000	2,000	3,000	
	9. Hematologi Analyzer	35,000	14,000	21,000	
	10. Thrombosit	15,000	6,000	9,000	
	11. Pengambilan Sampling	4,000	1,600	2,400	
	Pemeriksaan Laboratorium Dasar				
	1. Eritrosit, hitung jumlah	4,000	1,600	2,400	
	2. Lekosit hitung jumlah	4,000	1,600	2,400	
	3. Lekosit, hitung jenis	4,000	1,600	2,400	
	4. Hemoglobin, penetapan kadar	4,000	1,600	2,400	
	5. Pembekuan, masa	7,500	3,000	4,500	
	6. Perdarahan, masa	3,000	1,200	1,800	
	7. Laju endapan Darah	3,000	1,200	1,800	
	8. Penetapan Golongan Darah	3,000	1,200	1,800	
C	BIDANG PATOLOGI				
	A. Protien dan NPN				
	1. Albumin	10,000	4,000	6,000	
	2. Asam Urat	10,000	4,000	6,000	
	3. Bilirubin	10,000	4,000	6,000	
	4. Globulin	7,500	3,000	4,500	
	5. Kreatinin	10,000	4,000	6,000	
	6. Nitrit	4,000	1,600	2,400	
	7. Protien Benco Jones	7,500	3,000	4,500	
	8. Protien , Penetapan jumlah	7,000	2,800	4,200	
	9. Urea/Bun	10,000	4,000	6,000	
	10. Urobilin	5,000	2,000	3,000	
	11. Urobilinoge	5,000	2,000	3,000	
	B. Karbohidrat				
	1. Glukosa sewaktu	8,000	3,200	4,800	
	2. Glukosa Puasa	8,000	3,200	4,800	
	3. Glukosa, Kurva toleransi Glukosa 3x /5x	8,000	3,200	4,800	
	C. Lipid, Lipoprotien, Apoprotien				
	1. Fosfolipid/serebrosit, sfingolipid	10,000	4,000	6,000	
	2. HDL Kolesterol	15,000	6,000	9,000	
	3. LDL Kolesterol	40,000	16,000	24,000	
	4. Kolesterol	10,000	4,000	6,000	
	5. Tringliserid	17,000	6,800	10,200	
	D. Enzim				
	1. Alkali fosfatase	10,000	4,000	6,000	
	2. Gamma GT/Glutamil Transferas	20,000	8,000	12,000	
	3. Glutamat Oksaloasetik Transaminase/GOT	10,000	4,000	6,000	
	4. Glutamat Viruvat Transminase /SGPT	10,000	4,000	6,000	
	5. Laktat Dehidrogenase/LDH	20,000	8,000	12,000	
	6. CK-MB (Pemeriksaan Jantung)	40,000	16,000	24,000	
	7. CK_NAC	40,000	16,000	24,000	
	8. CPK/CK	40,000	16,000	24,000	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
D	BIDANG MIKROBIOLOGI				
	A. Bakteriologi				
	1. Sputum per slide	5,000	2,000	3,000	
	2. P. Gram	10,000	4,000	6,000	
	3. KOH/NaCL/M.Blue	10,000	4,000	6,000	
	4. Hansen BTA (paket)	15,000	6,000	9,000	
	B. Parasitologi				
	1. Malaria Mikroskopis	10,000	4,000	6,000	
	2. Mikrofilaria	15,000	6,000	9,000	
	3. Malaria Stik	20,000	8,000	12,000	
E	BIDANG SEROLOGI				
	1. Widal Test	18,000	7,200	10,800	
	2. Hepatitis B Aglutinasi (HBs-AG) (HBs-AG)	18,000	7,200	10,800	
	3. Tes Kehamilan	15,000	6,000	9,000	
	4. Hepatitis B Antibodi (HBs-AB)	18,000	7,200	10,800	
	5. Narkoba	40,000	16,000	24,000	
	6. Cholenesterasi	50,000	20,000	30,000	
	7. VDRL (Sfilis)	18,000	7,200	10,800	
	8. HIV	20,000	8,000	12,000	
	9. TPHA	18,000	7,200	10,800	
	10. Rheumatoid Faktor (RAF)	18,000	7,200	10,800	
	11. Anti HCV	50,000	20,000	30,000	
	12. Asto	18,000	7,200	10,800	
	Pemeriksaan Laboratorium Dasar				
	1. Analisa Tinja	16,000	6,400	9,600	
	2. Pemeriksaan Telor Cacing	10,000	4,000	6,000	
	3. Urin lengkap	10,000	4,000	6,000	
	4. Analisa Batu	16,000	6,400	9,600	
	5. Analisa sperma	16,000	6,400	9,600	
	6. Reduksi.	2,000	800	1,200	

